

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017-2020

Andri Irawan

Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Baturaja
andriirawan896@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of government spending on education (x_1), and government spending on health (x_2) on human development index (y) in South Sumatera in 2017-2020. The data used is secondary data from Central Bureau of Statistics and Directorate-General of Regional Fiscal Balance, Ministry of Finance. The method of analysis used is panel data regression. The results show that all independent variables simultaneously affect dependent variable proven by the f -statistic value smaller than α 5%. The result of t -test while government spending on education (x_1) and health (x_2) have positively and significantly effect on human development index (y). The result of coefficient of determination test shows that dependent variable can be explained by independent variable amounted up to 59,88% and the rest of 40,12% is explained by other factors outside this model.

Keywords: *government spending on education, government spending on health, human development index (IPM)*

1. Pendahuluan

Pembangunan daerah merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan potensi, aspirasi, serta permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah ini mencakup seluruh kegiatan pembangunan daerah dan sektoral yang berlangsung di daerah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara. Suatu Negara dikatakan maju bukan saja

dihitung dari pendapatan domestik bruto saja tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan masyarakatnya. Secara konsep, pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang penduduk untuk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik tersebut maka akan meningkatkan pula produktivitas penduduk. Peningkatan produktivitas ini, pada gilirannya mampu meningkatkan pembangunan manusia yang selanjutnya dengan

sendirinya berdampak pada penurunan angka kemiskinan (Widodo, 2011: 26).

Kemajuan pembangunan manusia diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2020 di wilayah Sumatera bagian selatan, provinsi dengan capaian tertinggi dalam pembangunan manusia adalah Kepulauan Bangka Belitung (71,47) dan diikuti Bengkulu (71,40), Jambi (71,29), dan Sumatera Selatan (70,01). Sedangkan Provinsi Lampung menempati urutan terendah (69,69). Adapun data indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020

No	Tahun	IPM (%)
1	2016	68.24
2	2017	68.86
3	2018	69.39
4	2019	70.02
5	2020	70.01

Sumber: BPS Sum-Sel

Data di atas jelas mendeskripsikan perkembangan indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Ini merupakan hal positif bagi provinsi Sumatera Selatan dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul, akan tetapi jika dinilai perbandingannya dengan Sumatera bagian selatan (Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung dan Sumatera Selatan), provinsi Sumatera Selatan menempati urutan ke 4. Oleh karena itu, diperlukan upaya khusus yang menyeluruh dari pemerintah dan juga setiap penduduk di provinsi Sumatera Selatan untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal tersebut harus mulai diperbaiki pada setiap Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan.

Hal ini menjadi sebuah target guna menjadi Provinsi Sumatera Selatan yang mampu bersaing dengan daerah atau provinsi lain khususnya di Indonesia sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dalam hal kualitas sumber daya manusia. IPM merupakan salah satu indikator dalam mencapai pembangunan ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan meminimalisasi dari kemiskinan.

Ranah pembangunan manusia melalui sektor pendidikan turut dipertimbangkan, karena melalui pendidikan manusia mengalami sebuah proses. Proses tersebut dilalui oleh manusia untuk meningkatkan ilmu, pengetahuan, kemampuan/keahlian, meningkatkan kreativitas ataupun inovasi yang keseluruhannya dapat meningkatkan harkat dan martabat setiap individu. Pendidikan terlihat sebagai investasi sumber daya saat ini untuk mendapatkan *return* dimasa depan. Apabila kualitas sumber daya manusia tersebut rendah yang tercermin adalah tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah pula yang tentunya berpengaruh juga pada pembangunan manusia. Senada dengan ranah pemikiran Schultz berargumentasi bahwa: pengetahuan dan skill adalah bentuk dari capital, yang akan menghasilkan "*deliberate investment*" (Astri, 2013: 80). Investasi dalam pendidikan formal, training, dan kesehatan akan meningkatkan kesempatan dan pilihan bagi individu, yang akan

mempengaruhi kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang produktif.

Proses pendidikan yang berkesinambungan tanpa memihak satu golongan minoritas, peningkatan layanan dan tingkat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan investasi publik melalui pengeluaran pemerintah, meningkatkan produktivitas masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, pemerataan akses, serta meningkatkan konsumsi masyarakat, merupakan beberapa cara yang efektif dan efisien guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan permasalahan ini maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2020”.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah adalah sebagai berikut (Mangkoesoebroto, 2012: 169):

1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi

yang dibedakan antara tahap awal, menengah, dan lanjutan.

2. Hukum Wagner

Hukum Wagner adalah sebagai berikut: dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara.

2.2. Pengeluaran Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan

Besarnya anggaran atau pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan akan menentukan besarnya jumlah penduduk miskin dan terpencil yang akan dijangkau oleh pendidikan melalui beasiswa atau sekolah murah, akses terhadap teknologi pendukung pendidikan, ketersediaan ruang sekolah setiap jenjang setiap warga negara, ketersediaan tenaga pendidik serta peningkatan kualitas tenaga pendidik (Wijayanto, 2015: 89). Semakin besar alokasi anggaran bidang pendidikan maka akan semakin besar pula kuantitas dan kualitas pendidikan yang akan diterima oleh penduduk, dengan demikian terdapat keterkaitan antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dengan IPM.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam

meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya (Suparno, 2014 :7).

2.3. Pengeluaran Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan

Peningkatan pengeluaran kesehatan akan terkait dengan peningkatan kemampuan untuk belajar dan meningkatkan umur panjang sehingga akan meningkatkan pembangunan manusia. Dengan demikian semakin besar pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan akan meningkatkan kesehatan masyarakat

yang pada gilirannya akan meningkatkan indeks harapan hidup dalam IPM (Wijayanto, 2015: 89)

Pengeluaran pemerintah merupakan investasi yang dapat menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. Banyak pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah pengeluaran di bidang kesehatan. Menurut Schult, mengemukakan bahwa fasilitas dan pelayanan kesehatan, pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina, tenaga serta vitalitas rakyat (Jhingan, 2012: 414). Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan. (Astri, 2013: 85) kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Oleh karena itu, diperlukan anggaran khusus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pengeluaran pemerintah. Karena dengan biaya yang besar yang dialokasikan oleh pemerintah untuk sektor kesehatan akan meningkatkan kesehatan dan produktivitas individu serta nantinya dapat meningkatkan pembangunan manusia. Bukan hanya itu saja anggaran pada sektor kesehatan dapat digunakan sebagai pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan masyarakat.

2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut Tambunan (2003:167), indeks pembangunan manusia (IPM), atau di kenal dengan sebutan *human development index* (HDI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM adalah suatu indeks komposisi yang didasarkan pada tiga indikator, yakni (a) kesehatan; (b) pendidikan yang dicapai, dan (c) standar kehidupan. Jadi, jelas bahwa ketiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu daerah/provinsi untuk meningkatkan IPM-nya. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Jadi, IPM di suatu daerah/provinsi akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah/provinsi tersebut. Dalam perkataan lain, terdapat suatu korelasi positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi.

3. Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS Sumsel) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu (DJPK Kemenkeu) khususnya data tahun 2017-2020. Data yang diteliti

meliputi pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah daerah bidang kesehatan dan indeks pembangunan manusia. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan *time series* (periode tahun 2017-2020) dan *cross-section* (17 kabupaten/kota) di Sumatera Selatan.

3.1. Analisis Regresi Data Panel

Menurut Gujarati (2012: 235), data panel (*pooled data*) atau yang disebut juga data *longitudinal* merupakan gabungan antara data *cross-section* dan data *time series*.

3.2. Spesifikasi Model Regresi Data Panel

Secara ekonometrika, hubungan antara pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah daerah bidang kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Propinsi Sumatera Selatan dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan berikut ini (Nachrowi, 2006:310) :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it} \dots (1)$$

dimana:

- Y :Indeks Pembangunan Manusia(%)
- α :Konstanta
- β₁,β₂ :Angka koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel independen
- X₁ :Pengeluaran Pemerintah daerah Bidang Pendidikan (Jutaan Rupiah)
- X₂ :Pengeluaran Pemerintah daerah Bidang Kesehatan (Jutaan Rupiah)
- i :Daerah
- t :Waktu
- e : *Error term*

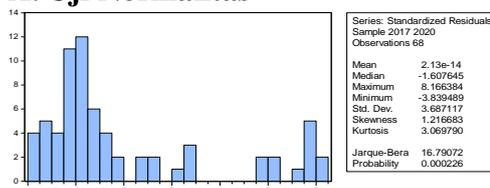
4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Ikhtisar Pemilihan Model Akhir

Dalam pengujian yang dilakukan sebelumnya, estimasi parameter dalam data panel menurut uji chow, uji lagrange (LM) dan uji hausman. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga uji tersebut, maka model yang akan dipilih adalah model *random effect*.

4.2. Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas



Sumber: Data diolah

Grafik 1. Uji Normalitas

Berdasarkan uji JB nilai JB-test = 16,79072. Sedangkan nilai *Chi-Square* dengan $k = 2$, derajat bebas atau $df = 68 - 2$, maka $df = 66$ pada $\alpha = 5\%$ yaitu $\chi^2 - \text{tabel} = 85,97$. Dengan demikian $JB\text{-test} < \chi^2\text{-tabel}$, berarti menerima H_0 yang menyatakan residual berdistribusi normal.

B. Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Nilai Uji Multikolinearitas

	X ₁	X ₂
X ₁	1	0.879
X ₂	0.879	1

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut di atas, maka hasil uji *multikolinearitas* dapat dilihat nilai koefisien korelasi antara X₁ dengan X₂ sebesar $0.879 < 0,9$. Melihat rendahnya nilai koefisien korelasi maka diduga tidak terdapat masalah multikolinearitas.

C. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

Model/Variabel	Sig/Prob
Konstanta	0.4800
Pengeluaran Pemerintah Daerah/Bidang Pendidikan (X ₁)	0.5184
Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan (X ₂)	0.8327

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut di atas, maka hasil uji *heteroskedastisitas* dapat dilihat dari nilai signifikansi/ Prob > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak ada masalah heteroskedastisitas.

D. Uji Autokorelasi

Nilai Durbin watson dapat dilihat pada Tabel 4. dapat diketahui bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1.199893. Karena nilai DW 1.199893 berada antara -2 sampai +2 dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model.

4.3. Analisis Determinasi (R²)

Hasil analisis sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 4. koefisien determinasi atau *R Square* (R²) adalah sebesar 0.598807 hal ini berarti sebesar 59,88 % variasi indeks pembangunan manusia (Y) bisa dijelaskan oleh variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah daerah bidang kesehatan (X₁, X₂), sedangkan sisanya sebesar 40,12 % dijelaskan sebab-sebab yang lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

4.4. Pengujian Hipotesis

1. Uji – F (Uji Secara Serentak)

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat pada Tabel 4. diperoleh nilai Probabilitas =

0,000000, hal ini berarti $Prob < 0,05$ maka H_0 ditolak artinya variabel pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah daerah bidang kesehatan (X_1, X_2) secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (Y) di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Uji – t (Uji Individu)

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel 4 diperoleh nilai $Prob < 0,05$ maka H_0 ditolak artinya semua variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah daerah bidang kesehatan (X_1, X_2) berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia (Y).

4.5. Model Regresi Data Panel Dengan Metode Random Effect Model

Tabel 4. Hasil Estimasi Model Regresi

Model/Variabel	Koefisien	Sig/Prob
Konstanta	-20.2857	0.0294
X_1	2.39213	0.0000
X_2	0.95133	0.0064
F_{hitung}	= 48.50846	0.000000
R^2	= 0.598807	
D-W	= 1.199893	

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 4 maka didapat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + e_{it} \dots\dots(2)$$

$$Y_{it} = -0.285 + 2.3921X_{1it} + 0.9513X_{2it}$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta regresi sebesar - 20,285 menyatakan bahwa jika Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan adalah nol

maka IPM adalah sebesar nilai konstanta yaitu 20,285 %.

- b. Nilai koefisien regresi variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan sebesar 2.3921 berarti Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan naik sebesar 1 % maka IPM akan naik sebesar 2.3921% dengan ketentuan variabel lain dianggap tetap.
- c. Nilai koefisien regresi variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan sebesar 0.9513 berarti Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan naik sebesar 1 % maka IPM akan naik sebesar 0.9513% dengan ketentuan variabel lain dianggap tetap.

4.6. Pembahasan Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien positif sebesar 2.39213 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan tahun 2017-2020. Hasil ini sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan tahun 2017-2020.

Wijayanto, Khusaini dan Syafitri (2015) mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap IPM, karena variabel pengeluaran bidang pendidikan dalam penelitian ini

merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi IPM jika dibandingkan variabel bebas lainnya, karena investasi pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan pembangunan manusia sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dapat tercapai. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai masalah krusial seperti masalah pengangguran, kriminalitas dan kesenjangan kesejahteraan yang menjadi beban bagi pemerintah. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang harus didukung dengan pembiayaan yang memadai dan merata.

Peningkatan pengeluaran untuk pendidikan dasar dapat memastikan bahwa manfaat dari belanja sosial yang didistribusikan secara merata akan mempercepat pembangunan manusia. Selanjutnya Astri, Nikensari dan Kuncara (2013) mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah pada sector pendidikan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap IPM, dimana setiap terjadi perubahan pada pengeluaran maka akan diikuti oleh perubahan IPM. Senada dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, dan harus diikuti oleh pemerintah daerah dengan menaikkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD, maka semakin mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan terhadap IPM.

Untuk dapat meningkatkan pembangunan manusia khususnya di bidang pendidikan perlu adanya usaha dari pemerintah, salah satunya meningkatkan anggaran pada sektor

pendidikan untuk digunakan sebagai pembangunan sarana pendidikan dan penambahan tenaga guru. Karena dengan biaya yang besar yang dialokasikan oleh pemerintah untuk sektor pendidikan akan membantu peningkatan pembangunan manusia, bukan hanya pembangunan manusia yang akan berkembang, melainkan juga pertumbuhan pembangunan sektor lainnya. Pendidikan telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial, dan kesetaraan akses terhadap pendidikan yang berkualitas telah menjadi tujuan penting dari kebijakan pembangunan.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien positif sebesar 0,951330 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan tahun 2017-2020. Hasil ini sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Selatan tahun 2017-2020.

Wijayanto, Khusaini dan Syafitri (2015) mengemukakan bahwa pengaruh pengeluaran bidang kesehatan terhadap pembangunan manusia dapat dijelaskan sebagai berikut, semakin lama hidup yang dijalani akan merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatan karena adanya perbaikan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan. Penyediaan anggaran digunakan untuk mendukung penyediaan

fasilitas kesehatan yang memadai baik berupa sarana maupun prasarana kesehatan, seperti rumah sakit, dokter, bidan, puskesmas, puskesmas pembantu dan posyandu serta berbagai layanan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin. Semakin besar alokasi pengeluaran kesehatan yang disediakan pemerintah, diharapkan semakin tinggi pula kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Usaha pemerintah daerah untuk selalu meningkatkan rasio pengeluaran kesehatannya, sehingga sejalan dengan capaian bidang kesehatan yang mempunyai pengaruh terhadap capaian IPM. Dimensi umur panjang dan hidup sehat mencerminkan aspek kesehatan, pada cakupan yang lebih luas merupakan ukuran kinerja pemerintah untuk meningkatkan IPM. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian dimensi umur panjang dan hidup sehat adalah angka harapan hidup. Sedangkan angka harapan hidup sendiri akan menjadi ke indeks harapan hidup yang merupakan indeks bagi dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam IPM.

Astri, Nikensari dan Kuncara (2013) mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah pada sector kesehatan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap IPM. Perkembangan indeks pembangunan manusia akan semakin meningkat jika pemerintah bersedia menanamkan investasi public dalam belanja ataupun pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan. Semestinya, untuk meningkatkan kualitas manusia yang produktif tidak hanya pendidikan yang menjadi fokus perhatian dari kebijakan

pemerintah, melainkan pelayanan kesehatan yang tercermin dari pengeluaran pemerintah pada sector kesehatan juga ikut mempengaruhi kualitas manusia yang akan berujung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada setiap daerah. Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan tersebut maka akan meningkatkan pula produktivitas penduduk.

Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Suparno, 2014: 5). Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, di mana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup banyak untuk sektor kesehatan, sedangkan hingga sekarang ini makin banyak program-program kesehatan seperti jaminan kesehatan masyarakat, program keluarga berencana, subsidi obat generik, sampai pelayanan kesehatan gratis yang sedang diselenggarakan secara terus-menerus dan membutuhkan biaya yang sangat banyak terlebih lagi jumlah penduduk yang besar dan jumlah penduduk miskin juga bertambah tiap tahunnya yang merupakan sasaran.

Menurut Schult, mengemukakan bahwa fasilitas dan pelayanan kesehatan, pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina, tenaga serta vitalitas rakyat (Jhingan, 2012: 414). (Astri, 2013:85) Kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia, dengan kata lain aspek kesehatan turut mempengaruhi kualitas manusia. Kekurangan kalori, gizi, ataupun rendahnya derajat kesehatan bagi penduduk akan menghasilkan kualitas yang rendah dengan tingkat mental yang terbelakang. Oleh karena itu, diperlukan anggaran khusus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui pengeluaran pemerintah. Karena dengan biaya yang besar yang dialokasikan oleh pemerintah untuk sektor kesehatan akan meningkatkan kesehatan dan produktivitas individu serta nantinya dapat meningkatkan pembangunan manusia. Bukan hanya itu saja, anggaran pada sektor kesehatan dapat digunakan sebagai pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan masyarakat.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa, beberapa simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Secara simultan variabel pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah daerah bidang kesehatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Selatan.

2. Secara parsial variabel pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah daerah bidang kesehatan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Selatan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis mencoba mengungkapkan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya pengawasan dan kontrol yang baik pada proses perencanaan dan penyaluran dana pada tiap-tiap pengeluaran pemerintah daerah bidang pendidikan dan kesehatan yang dilakukan pemerintah baik kota/kabupaten adalah sangat penting agar terdistribusi secara tepat sasaran sehingga dampaknya dapat dinikmati seluruh masyarakat pada daerah tersebut.
2. Penelitian ini masih sangat sederhana untuk itu perlu adanya penelitian lanjutan, misalnya dengan melakukan pengujian dengan model lain, menambah periode dan variabel lain dalam penelitian lain.

Daftar Pustaka

- Astri, Meylina., Nikensari, Sri Indah dan Kuncara W, Harya. 2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol. 1 No. 1 Maret 2013.*

- Badan Pusat Statistik (BPS). 2021. Sumatera Selatan Dalam Angka.
- Gujarati, D.N dan Porter, Dawn C. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Salemba Empat: Jakarta.
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Jhingan, M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2012. *Ekonomi Publik*. Edisi Ketiga Fakultas Ekonomi UGM: Yogyakarta
- Nachrowi, Djalal Nachrowi dan Usman, Hardius. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.
- Suparno, Heri. 2014. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Timur. *Ekonomika-Bisnis Vol. 05 No. 1 Bulan Januari Tahun 2014*.
- Tambunan, Tulus T.H. 2003. *Perekonomian Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Widodo, Adi., Waridin dan Maria, Johanna. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengetasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Pembangunan Volume 1 Nomor 1, Juli 2011*.
- Wijayanto, Anang., Khusaini, Moh dan Safitri, Wildan. 2015. Analisis Pengaruh Pengeluaran Kesehatan dan Pendidikan Serta PDRB Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (Studi Terhadap Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG) Vol. 1, No. 2, October 2015, pages 85-95*.